

# **PENGARUH BELANJA SEKTOR KESEHATAN TERHADAP ANGKA HARAPAN HIDUP DI SULAWESI UTARA**

**Ricky Wowor**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
e-mail : [rickywowor21@gmail.com](mailto:rickywowor21@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Didalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah sangatlah diperlukan peranan yang dominan pemerintah di daerah tersebut, dimana pemerintah melakukan pembelanjaan dengan harapan semakin besarnya belanja pemerintah dapat semakin besar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang di dalamnya terdapat komponen angka harapan hidup merupakan salah satu alat ukur dalam melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apabila angka harapan hidup di suatu daerah semakin tinggi maka tingkat produktifitas masyarakat didaerah tersebut semakin tinggi pula di ikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita yang meningkatkan daya beli sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah utuk meneliti pengaruh belanja pemerintah di bidang Kesehatan terhadap angka harapan hidup di propinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data belanja pemerintah Sulawesi utara di bidang kesehatan dan data angka harapan hidup di Sulawesi utara dengan tahun dasar 2004 sampai dengan tahun 2013 yang di peroleh dari BAPPEDA Sulawesi Utara dan BPS Sulawesi Utara. Hasil pengujian regresi sederhana kedua variable tersebut memiliki hubungan dimana belanja pemerintah semakin meningkat tiap tahunnya dari tahun dasar memacu pertumbuhan angka harapan hidup sebesar satu koma lima persen setiap tahunnya dari tahun dasar.

***Kata Kunci : (belanja sektor kesehatan, angka harapan hidup di Sulawesi utara)***

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Keynes dalam Deliarnov (2003), pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal, Karena Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.

Menurut Rostow dalam Jhingan (2007), yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah hanya menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan untuk dapat memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Wagner menambahkan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of everincreasing state activity*). Musgrave (2005) Hukum pengeluaran pemerintah di definisikan dalam pengertian peningkatan porsi pemerintah. Dimana perubahan harga dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah di pengaruhi oleh peroduktifitas yang berimbas pada pendapatan perkapita.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah suatu daerah dalam bidang kesehatan dapat mempengaruhi angka harapan di daerah tersebut, yang secara langsung mempengaruhi produktifitas penduduk dan pendapatan perkapita yang memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan ialah belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana komponen belanja tidak langsung adalah belanja pemerintah untuk pengeluaran gaji pegawai, sedangkan komponen belanja langsung ialah belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa, total belanja pemerintah di bidang kesehatan ialah total penjumlahan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam realisasi APBD pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui Pengaruh Belanja disektor kesehatan terhadap angka harapan hidup di Sulawesi Utara

## Tinjauan Pustaka

Berkembangnya fungsi – fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan pemerintah propinsi untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya pemerintah propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan penggunaannya secara sistematis menurut kebutuhan.

Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi anggaran dapat diartikan Suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana. Sebuah anggaran dalam arti umum dari istilah, adalah rencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah karena itu adalah pernyataan dari pengeluaran yang diusulkan dan pendapatan yang diharapkan untuk periode yang akan datang bersama-sama dengan data pengeluaran aktual dan pendapatan untuk periode saat ini dan sebelumnya.

Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

Dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu hal yang penting yaitu :

- a. Untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah.
- d. Merupakan suatu cara untuk mengadakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas – batas tertentu.

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau Pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol terhadap pendapatan ataupun

pengeluaran dimasa yang akan datang. Sejak tahun 1967 rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah (RAPBD) disusun dan berlaku mulai tanggal 1 april dan sampai tanggal 31 maret tahun berikutnya, namun khusus pada tahun 2000 anggaran dimulai pada tanggal 1 april dan berakhir pada tanggal 31 desember. Untuk tahun – tahun berikutnya tahun anggaran dimulai pada tanggal 31 januari dan berakhir pada tanggal 31 desember, seperti yang pernah dijalankan sebelumnya pada tahun anggaran 1967/68.

Seperti anggarna pada umumnya APBD dan APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya penerimaan dikelompokkan menjadi peneriman rutin dan penerimaan pembangunan, dan sisi pengeluaran juga dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Penerimaan rutin disebut sebagai penerimaan daerah yang terdiri dari pos pendapatan asli daerah sendiri (PADS), bagi hasil pajak dan bukan pajak dan bagian dari sumbangandan bantuan. Lebih rinci lagi yang dimaksud dengan PADSterdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, ditambah dengan keuntungan perusahaan daerah serta penerimaan lain-lain yang sah seperti biaya perijinan hasil dari kekayaan daerah dan pendapatan lainnya.

Dalam hal penerimaan pendapatan daerah dapat berupa bagi hasil dari penerimaan pajak pemerintah pusat seperti dari PBB maupun dari pihak bahan bakar kendaraan bermotor, maupun bagi hasil dari pungutan kekayaan daerah seperti iuran hasil hutan. Selanjutnya bantuan dan ganjaran ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pernerintah pusat atau pemerintah propinsi.

Di sisi pengeluaran rutin untuk gaji pegawai dan belanja barang disamping untuk pembiayaan DPRD dan Kepala Daerah. Di samping pengeluaran rutin terdapat pengeluaran pembangunan untuk sektor- sektor.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.22Tahun1999babVIII pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) di biyai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Daerah(APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas Pemerintah(pusat) di Daerah dibiayai dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada kegiatan pemerintah dan pembiayaannya di Daerah. Tugas dan kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya bersifat lebih terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti dalam hal penerangan jalan, mobil, pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu lintas dan sebagainya. Sedangkan penyediaan barang publik yang mempunyai dampak sangat luas Seperti pertahanan keamanan. Keadilan serta kesehatan masyarakat, sebaliknya merupakan tanggung

jawab pemerintah pusat. Disamping itu pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan. Pengaturan dan perlindungan terhadap masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara serta pemanfaatan SDA.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga perlu memahami dimana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh. Dalam hal ini Undang-Undang No.22 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disiapkan oleh Pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) atas persetujuan DPRD selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBN.

Perubahan APBD dimungkinkan dan ditetapkan dengan PERDA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Selanjutnya perhitungan APBD ditetapkan dengan PERDA selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Akhirnya APBD yang telah ditetapkan dengan PERDA diberikan kepada Gubernur bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi pemerintah provinsi untuk diketahui.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu “proses” untuk memluas pilihan-pilihan bagi penduduk (Human Development Report, 2001), dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk dapat mengukur seberapa besar Keberhasilan program Pembangunan Kesehatan di suatu daerah dapat digunakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka harapan hidup. Dimana Angka Harapan Hidup adalah Angka Harapan Hidup pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya atau Angka Harapan Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan Belanja pembangunan khususnya untuk sector kesehatan terhadap perkembangan Indikator Kesehatan, penulis tertarik menganalisis masalah ini dengan melakukan penelitian ilmiah dengan judul

## **Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup Di Sulawesi Utara.**

### **Penelitian Terdahulu**

Abdi Buchari(2001) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara, dalam penelitiannya dengan menggunakan metode Shift-Share Analysis, didapati bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara masih sangat dominan diatur oleh pemerintah pusat, terutama kebijaksanaan fiskal dan moneter, serta struktur pembiayaan pembangunan daerah, dimana komponen ini berkisar antara 60 sampai 70 persen. Di samping itu, anggaran pembangunan dalam struktur APBD provinsi maupun kabupaten/ kota masih sangat kecil pengaruhnya dalam memberi efek-efek terhadap sektor – sektor ekonomi daerah.

Penelitian dari Inra Sambiran (2003) yang berjudul “Analisis Pengeluaran Pembangunan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara”. Dalam penelitiannya metode yang digunakan adalah Metode Analisis Tabel dan Metode Analisis Regresi Linear Sederhana, menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan pada 0,10 %. Dengan elastisitas pertumbuhan 0,127 %. Artinya, jika terjadi kenaikan anggaran pembangunan sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara meningkat sebesar 0,127% (ceteris paribus).

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Belanja pemerintah Sulawesi Utara setiap tahunnya memiliki kenaikan demikian juga dengan indikator kesehatan Sulawesi Utara yang di ukur dengan pencapaian angka harapan hidup yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yakni data dari tahun 2004-2013. Sumber data adalah dari instansi pemerintah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini terutama Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara dan SKPD lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dengan metode pengumpulan data ialah dengan mendatangi langsung ke sumber data. Selain itu sebagai pelengkap digunakan metode pengumpulan melalui sumber-sumber data dari internet. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Realisasi Belanja di bidang kesehatan belanja/pengeluaran pemerintah dalam satu tahun yang digunakan untuk pembiayaan bidang kesehatan di Propinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam satuan rupiah.
- b. Angka Harapan hidup adalah : Rata – Rata tahun hidup yang akan di jalani masyarakat di Sulawesi utara setelah menjalani umur tertentu dalam keadaan yang berlaku di lingkungan masyarakat Sulawesi utara yang diukur dalam

satuan tahun.

Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi sederhana dan diolah dengan menggunakan program SPSS.

### 3. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Pengaruh Realisasi Belanja di Bidang Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Utara

Data penelitian merupakan data dengan model Time Series dengan kurun waktu dari tahun 2004 sampai dengan 2013. Seperti pada table di bawah di dapat dilihat 2004 sampai dengan 2013 pengeluaran pemerintah Sulawesi Utara di bidang kesehatan semakin meningkat, berbanding positif dengan perkembangan angka harapan hidup di Sulawesi utara, dimana pada tingkatan harga pengeluaran pemerintah pada tahun dasar 2004 sebesar Rp.15.682.087 dan angka harapan hidup berada pada rasio 71,00 tahun dan seterusnya.

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun) - Y	Belanja Pemerintah (Rupiah) – X (X = a+b)	Logaritma Belanja Pemerintah (Log X)	Belanja Tidak Langsung Pemerintah di bidang Kesehatan (Rupiah) (a)	Belanja Langsung Pemerintah di Bidang Kesehatan (Rupiah) (b)		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
2004	71.00	15,681,087,871	10,20	11,957,572,543	357,488,612	2,890,698,256	475,328,460
2005	71.70	22,741,097,824	10,36	17,683,423,232	548,547,488	3,784,922,112	724,204,992
2006	71.80	31,467,485,376	10,50	22,672,640,000	2,453,825,216	6,341,020,160	0
2007	72.00	42,234,211,551	10,63	30,821,711,385	3,217,792,007	5,759,024,788	2,435,683,371
2008	72.01	45,075,721,286	10,65	34,850,913,200	1,988,750,500	7,059,261,986	1,176,795,600
2009	72.12	53,914,746,217	10,37	35,596,664,305	1,382,530,875	10,287,993,412	6,647,557,625
2010	72.22	65,538,600,608	10,82	44,725,190,489	3,890,234,541	12,765,890,551	4,157,285,027
2011	72.33	90,579,537,736	10,96	64,851,526,209	4,862,793,176	16,081,575,872	4,783,642,479
2012	72.43	105,854,708,113	11,02	77,579,255,514	5,505,328,913	15,937,892,345	6,832,231,341
2013	72.65	125,754,220,805	11,10	83,890,542,135	5,431,289,013	20,252,553,942	16,179,835,715

Sumber : BAPPEDA dan BPS Sulawesi Utara

Hasil analisis regresi sederhana tentang pengaruh realisasi belanja pemerintah Sulawesi Utara di bidang kesehatan terhadap angka harapan hidup penduduk Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- **Deskriptif Statistik**

#### Descriptive Statistics

Variables	Mean	Std. Deviation	N
Angka Harapan Hidup	72.0260	.45976	10
Belanja di Bidang Kesehatan	10.6959	.29183	10

### Deskriptif Statistik

Hasil *Descriptive Statistics* menunjukkan bahwa rata-rata nilai angka harapan hidup adalah 72,02 dengan deviasi standar 0,45976 sedangkan nilai rata-rata realisasi belanja di bidang kesehatan adalah 10,6959 dan deviasi standar 0,29183, artinya variabel penelitian ini memiliki linieritas data yang baik dengan penyimpangan yang kecil.

- **Koefisien**

#### Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.808	1.618		34.490	.000
Belanja di Bidang Kesehatan	1.516	.151	.962	10.026	.000

#### Koefisien

Berdasarkan hasil analisis data dalam tabel koefisien maka dapat buat interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan Regresi dari penelitian ini adalah :  $Y = 55.808 + 1.516X$ . Nilai koefisien konstanta adalah sebesar 55.808 Besaran nilai konstanta ini mengandung arti bahwa jika realisasi belanja di bidang kesehatan adalah 0 atau belum ada realisasi belanja, maka angka harapan hidup rata-rata dari masyarakat di Sulawesi Utara adalah 55.808 tahun. Koefisien regresi adalah sebesar 1.516. Besaran nilai koefisien regresi ini mengandung arti bahwa jika realisasi belanja APBD meningkat sebesar 1 % dari nilai realisasi bealnja tahun sebelumnya maka angka harapan hidup juga akan bertambah sebesar 0,798 %.
- Nilai t hitung adalah 10.026 sedangkan nilai t tabel untuk alpha 5 % dan df (10-1= 9) adalah 1,83. Berarti t hitung > t tabel. Nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian realisasi belanja di bidang kesehatan memiliki pengaruh terhadap angka harapan hidup di Sulawesi Utara.

- **Model Summary**

#### Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.962	.926	.917	.13240

Berdasarkan data hasil analisis yang ada dalam tabel model summary maka dapat diinterpretasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Koefisien Korelasi



Besarnya koefisien korelasi (R) adalah 0.962. Besaran nilai ini mengandung arti bahwa antara realisasi belanja di bidang kesehatan sebagai variabel bebas dengan angka harapan hidup sebagai variabel terikat memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat positif.

b. Koefisien determinasi

Besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,926 atau 92.6 %. Besaran nilai ini mengandung arti bahwa realisasi belanja di bidang kesehatan memberikan kontribusi sebesar 92.60 persen terhadap perkembangan angka harapan hidup penduduk di Sulawesi Utara.

c. Standard Error of the Estimate

*Standard Error of the Estimate* menunjukkan angka sebesar 0.13240. Hal ini mengandung arti bahwa berdasarkan keerratan dan kontribusi antara realisasi belanja di bidang kesehatan sebagai variabel bebas dengan angka harapan hidup penduduk di Sulawesi Utara sebagai variabel terikat, ketika hasil regresi dipakai untuk melakukan estimasi pengaruh dan kaitan antara kedua variabel ini untuk masa yang akan datang, maka tingkat kesalahan estimasinya hanya sebesar 0.13240 persen.

- **Normalitas Data**

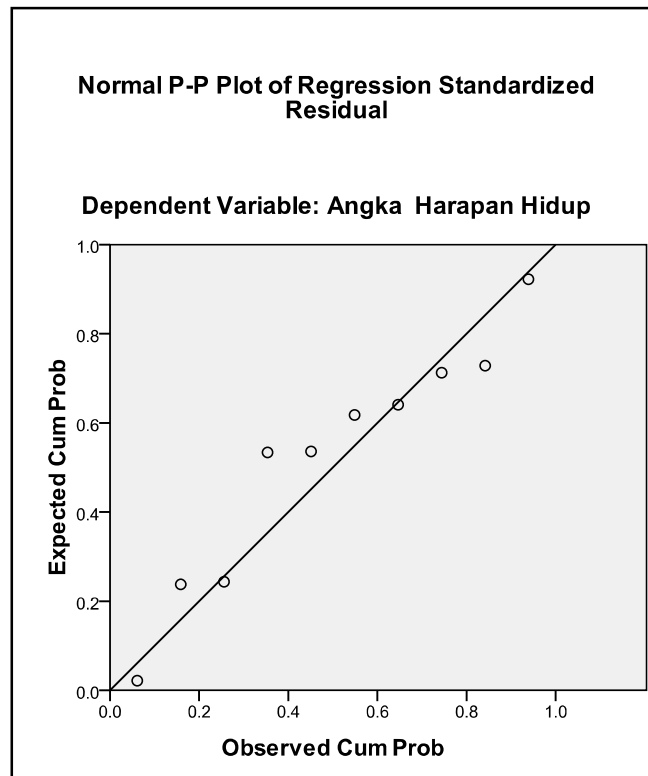
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Parameters		Belanja di Bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup
N		10	10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	10.6959	72.0260
	Std. Deviation	.29183	.45976
Most Extreme Differences	Absolute	.115	.177
	Positive	.083	.090
	Negative	-.115	-.177
Kolmogorov-Smirnov Z		.362	.561
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999	.911

**Tabel 4.5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Berdasarkan hasil olahan data dalam tabel One –Sample Kolmogrov-Smirnov Test maka nilai *asympt.sign (2-tailed)* untuk variabel realisasi belanja di bidang kesehatan adalah sebesar 0.999 atau lebih besar dari 0,5. Demikian juga nilai *asympt.sign (2-tailed)* untuk variabel angka harapan hidup adalah sebesar 0.911 atau lebih besar dari 0,5 sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan

dalam penelitian ini terdistribusi normal.



**Gambar 4. 1 Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual**

Tabel normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan bahwa sebaran plot variable penelitian tidak menyebar jauh namun berada dekat dengan garis regresi dengan pola yang teratur. Berdasarkan sebaran plot ini maka data penelitian memiliki sebaran yang normal.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun-tahun pengamatan memiliki pengaruh terhadap angka harapan hidup penduduk di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun dasar angka harapan hidup rata-rata penduduk Sulawesi Utara adalah 71 tahun. Dengan pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 15.681.087.871 dan Ketika pemerintah mulai merealisasikan belanja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maka angka harapan hidup akan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 1.516 persen pada tahun – berikutnya.

Pemerintah Sulawesi Utara diharapkan untuk terus meningkatkan realisasi belanja di bidang kesehatan setiap tahun, sebab dengan semakin bertambahnya nilai

alokasi belanja yang terealisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang terwujud melalui kualitas kesehatan masyarakat di Sulawesi Utara akan semakin baik sehingga angka harapan hidup juga semakin meningkat setiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, A. 2001. *Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara*. Progress Press. Manado.
- BPS. Sulawesi Utara Dalam Angka 2009, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. [www.sulut.bps.go.id](http://www.sulut.bps.go.id)
- Deliarnov, 2003, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hariadi. 2010. *Pendapatan Daerah*. <http://www.pendapatandaerah.com>. Diakses pada Desember, 2010.
- Ismawanto. 2009. *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*. <http://www.APBD.com>. Diakses pada Desember, 2010.
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Lincoln, A. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan: Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPF.
- Mankiw, G. 2003. *Pengantar Ekonomi*, Edisi Kedua, Jilid Dua, Erlangga, Jakarta.
- Musgrave, R., P. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara. Cetakan Kedua*. Erlangga. Jakarta.
- Nachrowi Djalal dan Usman H, 2008, *Penggunaan Teknik Ekonometrik, Pendekatan Populer Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 pasal 27. 2005. *Klasifikasi Belanja Daerah*.
- Pratama, R., M. Manurung. 2005. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. FE-UI. Jakarta.
- Sambiran, I. 2003. *Analisis Pengeluaran Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Perekonomian Sulawesi Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi.

Santosa & Ashari, 2007, *Analisis Statistik dengan MS Excel dan SPSS*, Penerbit ANDI  
Yogyakarta

Ul Haq, Mahbub. *Human Development Report: The Human Development Concept*.